

Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo

Layosibana Akhirun¹, Dewi Sartika T. Zees²
Universitas Bina Taruna Gorontalo
layosibana@gmail.com¹, dewi.zees90@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumen kebijakan daerah. Pembangunan wilayah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan dengan ketimpangan antarwilayah, keterbatasan sumber daya, dan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan potensi alam dan sosial ekonomi yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang menekankan pada potensi lokal sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Gorontalo telah diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis komunitas, namun masih menghadapi kendala berupa rendahnya kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Upaya optimalisasi potensi lokal memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dengan prinsip partisipatif dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan integrasi perencanaan berbasis potensi lokal ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Kata Kunci: **Perencanaan Wilayah; Potensi Lokal; Pembangunan Berkelanjutan**

ABSTRACT

This study aims to analyze strategies for local potential-based regional development planning in achieving sustainable development in Gorontalo Regency. The research employs a qualitative descriptive method using literature review and regional policy document analysis. Regional development in Indonesia faces complex challenges related to interregional disparities, limited resources, and environmental sustainability. Gorontalo Regency, with its diverse natural and socioeconomic potential, requires a development approach that emphasizes local potential as the main driver of regional economic growth. The results indicate that the regional development planning in Gorontalo Regency focuses on strengthening agriculture, fisheries, and community-based tourism sectors. However, challenges remain in institutional capacity, cross-sectoral coordination, and development financing. Optimization of local potential requires synergy between local government, communities, and businesses through participatory and environmentally sustainable principles. The study recommends integrating local potential-based planning into regional development documents such as the RPJMD and improving human resource capacity at the village level.

Keywords: Regional Planning, Local Potential, Sustainable Development

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan wilayah tidak hanya difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya pemerataan hasil pembangunan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan di era desentralisasi seperti saat ini (Sirojuzilam & Mahalli, 2017).

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang khas. Wilayah ini terdiri atas dataran rendah yang subur, kawasan perbukitan, dan pesisir yang kaya sumber daya perikanan. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri kecil berbasis sumber daya lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, 2023). Namun, potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya integrasi perencanaan antar-sektor.

Perencanaan wilayah berbasis potensi lokal pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan keunikan sumber daya dan kondisi sosial budaya daerah sebagai dasar utama perumusan kebijakan pembangunan (Kuncoro, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor unggulan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan pemangku kepentingan daerah dalam seluruh tahapan perencanaan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal secara partisipatif (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, berbagai kebijakan pembangunan daerah telah diarahkan untuk meningkatkan daya saing wilayah berbasis potensi unggulan, seperti pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Limboto dan pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir Batudaa Pantai. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah, di mana sebagian besar kegiatan ekonomi masih terpusat di kawasan perkotaan, sedangkan wilayah pedesaan tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses pasar (Bappeda Kabupaten Gorontalo, 2023).

Selain itu, persoalan keberlanjutan lingkungan juga menjadi isu strategis. Peningkatan intensitas alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, terutama di daerah sekitar Danau Limboto yang merupakan ekosistem penting bagi masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan wilayah yang berorientasi pada potensi lokal harus

memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Fauzi & Suhardjo, 2021).

Di sisi lain, implementasi desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam, menentukan prioritas pembangunan, serta merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Namun, kewenangan tersebut harus diimbangi dengan kapasitas perencanaan yang kuat, data spasial yang akurat, dan koordinasi antar-instansi yang efektif agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan (Anwar & Syafruddin, 2019).

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana konsep perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Gorontalo. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi perencanaan wilayah, serta merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Menurut Friedmann dan Alonso (2018), perencanaan wilayah merupakan proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sektor, spasial, dan sosial untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Dalam konteks pembangunan berbasis potensi lokal, pendekatan ini menekankan pentingnya *endogenous development*, yaitu pembangunan yang bersumber dari kekuatan internal suatu wilayah, bukan sekadar mengandalkan investasi eksternal.

Konsep ini juga sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikemukakan oleh World Commission on Environment and Development (WCED, 1987) dan terus dikembangkan oleh berbagai peneliti modern (Purba et al., 2022; Nugraha, 2020). Pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber daya yang sama.

Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan wilayah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua regulasi tersebut memberikan landasan bagi daerah untuk mengembangkan perencanaan wilayah sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.

Menurut Kuncoro (2020), pendekatan berbasis potensi lokal dalam perencanaan wilayah mencakup beberapa prinsip utama:

1. Pemetaan Potensi Daerah, yakni identifikasi sumber daya alam, manusia, dan sosial yang dapat dikembangkan.
2. Partisipasi Masyarakat, di mana warga lokal dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Sinergi Antar-Sektor dan Antar-Wilayah, untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mengoptimalkan sumber daya.
4. Keberlanjutan Lingkungan, agar setiap kebijakan pembangunan tidak menimbulkan degradasi ekologi.

Kabupaten Gorontalo terletak di bagian tengah Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sekitar 2.125,47 km², terdiri dari 19 kecamatan dan 205 desa. Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk mencapai 404.652 jiwa dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan.

Potensi utama wilayah ini meliputi:

- Sektor pertanian, terutama padi, jagung, dan kelapa sebagai komoditas unggulan.
- Sektor perikanan dan kelautan, yang berkembang di kawasan pesisir Batudaa Pantai dan Biluhu.
- Sektor pariwisata alam dan budaya, seperti Danau Limboto, Benteng Otanaha, dan situs sejarah Limboto.

Namun, tantangan pembangunan wilayah ini cukup kompleks. Di satu sisi, masih terdapat ketimpangan pembangunan antar-kecamatan, khususnya antara kawasan pusat pemerintahan dan wilayah pegunungan atau pesisir. Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan seperti sedimentasi Danau Limboto dan degradasi hutan menuntut adanya strategi pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan (Kadir & Karim, 2021).

Pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal menjadi relevan bagi Kabupaten Gorontalo karena mampu mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Menurut Suparjo (2019), pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan secara terencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tanpa harus bergantung pada sumber daya eksternal.

Selain itu, konsep ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan daerah (Rahardjo & Widiastuti, 2022). Dengan demikian, pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan wilayah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

Meski memiliki potensi besar, implementasi perencanaan wilayah berbasis potensi lokal di Kabupaten Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan data dan informasi spasial yang akurat, yang menghambat analisis potensi wilayah.
2. Koordinasi antar-instansi pemerintah daerah yang belum optimal, sehingga menyebabkan tumpang tindih program.
3. Kapasitas SDM perencana daerah yang masih terbatas, terutama dalam hal penguasaan analisis spasial dan perencanaan partisipatif.
4. Minimnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, yang seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
5. Tekanan terhadap lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan penurunan kualitas air Danau Limboto, yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan.

Mengatasi tantangan tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis data. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara perencanaan sektoral dan spasial, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperluas partisipasi publik melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang lebih inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang sistematis dalam merumuskan arah, strategi, serta kebijakan pembangunan di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Glasson & Marshall, 2019). Tujuan utama perencanaan wilayah adalah menciptakan keseimbangan antarwilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

Menurut Friedmann dan Alonso (2018), perencanaan wilayah memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan tata ruang agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Dalam konteks desentralisasi, perencanaan wilayah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Sirojuzilam dan Mahalli (2017) menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan wilayah sangat bergantung pada sejauh mana perencanaan tersebut mampu mengintegrasikan dimensi spasial dan sektoral. Artinya, perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan secara sektoral terpisah, tetapi harus mempertimbangkan keterkaitan antarwilayah dan keterpaduan lintas sektor.

Lebih lanjut, Kuncoro (2020) menjelaskan bahwa perencanaan wilayah idealnya didasarkan pada analisis potensi lokal, daya dukung lingkungan, dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hasil perencanaan tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Konsep pembangunan berbasis potensi lokal (*local-based development*) menekankan pemanfaatan keunggulan dan karakteristik khas suatu daerah sebagai dasar dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (Suparjo, 2019). Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap kegagalan model pembangunan sentralistik yang cenderung mengabaikan potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang berangkat dari kapasitas lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah *endogenous development*, yaitu pembangunan yang tumbuh dari kekuatan internal wilayah.

Di sisi lain, Nugraha (2020) menambahkan bahwa pembangunan berbasis potensi lokal mencakup tiga komponen utama:

1. Identifikasi Potensi Unggulan, meliputi pemetaan sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang khas dari suatu wilayah.
2. Partisipasi Masyarakat, yang memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
3. Kelembagaan Lokal yang Kuat, untuk mendukung implementasi dan keberlanjutan program pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, pendekatan ini sangat relevan karena wilayah tersebut memiliki sumber daya pertanian, perikanan, dan pariwisata yang potensial. Menurut BPS (2023), lebih dari 60% masyarakat Kabupaten Gorontalo bekerja di sektor pertanian, sehingga pengembangan ekonomi berbasis agraris dapat menjadi pilar utama pembangunan wilayah.

Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) diperkenalkan pertama kali melalui laporan *Our Common Future* oleh WCED (1987), yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Fauzi dan Suhardjo (2021) menjelaskan bahwa dalam konteks perencanaan wilayah, pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan kata lain, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem.

Purba, Sitorus, dan Nasution (2022) menyatakan bahwa penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konteks daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan, untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan kemampuan ekologis wilayah.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal, guna menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
3. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola, agar implementasi kebijakan berjalan transparan dan akuntabel.

Bagi Kabupaten Gorontalo, isu keberlanjutan sangat penting mengingat tantangan seperti sedimentasi Danau Limboto, degradasi hutan, dan perubahan penggunaan lahan yang intensif. Oleh karena itu, perencanaan wilayah yang mengintegrasikan aspek ekologis merupakan keharusan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan ketahanan wilayah.

Prinsip-prinsip Perencanaan Berbasis Potensi Lokal

Kuncoro (2020) dan Suparjo (2019) merumuskan beberapa prinsip utama dalam perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal, yaitu:

1. **Prinsip Kesesuaian (*Suitability Principle*)**
Setiap wilayah memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda, sehingga strategi pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan dan potensi lokal. Misalnya, daerah pesisir lebih cocok dikembangkan untuk perikanan dan pariwisata, sementara daerah pegunungan untuk pertanian organik atau kehutanan rakyat.
2. **Prinsip Partisipasi (*Participatory Principle*)**
Pembangunan harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi publik menjamin kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal (Rahardjo & Widiastuti, 2022).
3. **Prinsip Kemandirian (*Self-Reliance Principle*)**
Pembangunan berbasis potensi lokal harus mendorong kemandirian daerah, bukan ketergantungan terhadap dana pusat. Penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan industri berbasis sumber daya alam lokal menjadi pilar utama kemandirian wilayah.
4. **Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability Principle*)**
Setiap aktivitas pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan (Fauzi & Suhardjo, 2021).
5. **Prinsip Keterpaduan (*Integration Principle*)**
Perencanaan harus mengintegrasikan antar-sektor dan antar-wilayah. Misalnya, pengembangan pertanian harus terhubung dengan sektor industri pengolahan dan jaringan transportasi.

Prinsip-prinsip tersebut jika diterapkan dengan baik akan membantu pemerintah daerah dalam menciptakan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, terutama di daerah dengan keanekaragaman potensi seperti Kabupaten Gorontalo.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Wilayah

Menurut Glasson dan Marshall (2019), efektivitas perencanaan wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Kapasitas Institusional, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengelola sumber daya.
2. Data dan Informasi Spasial, sebagai dasar analisis dalam penyusunan rencana pembangunan.
3. Koordinasi Antar-Sektor dan Antar-Wilayah, untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
4. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha, dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan.
5. Pendanaan Pembangunan, yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam konteks Gorontalo, tantangan seperti lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan data spasial masih menjadi kendala. Bappeda Kabupaten Gorontalo (2023) mencatat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berdampak pada efektivitas implementasi pembangunan.

Model dan Pendekatan dalam Perencanaan Wilayah

Berbagai model dan pendekatan telah dikembangkan untuk mendukung efektivitas perencanaan wilayah. Salah satu yang paling relevan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif (*collaborative planning*). Menurut Healey (2018), pendekatan ini menekankan keterlibatan semua pemangku kepentingan — pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta — dalam proses perencanaan.

Selain itu, terdapat model perencanaan adaptif (*adaptive planning*) yang menekankan fleksibilitas kebijakan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Model ini sangat relevan dalam menghadapi dinamika global seperti perubahan iklim dan urbanisasi cepat (Givoni et al., 2021).

Dalam konteks pengelolaan sumber daya lokal, pendekatan ekonomi lokal (*local economic development*) juga menjadi landasan penting. Model ini berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah dari potensi daerah (Suparjo, 2019).

Perencanaan Wilayah dalam Perspektif Kebijakan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh dokumen tersebut harus disusun secara terpadu dengan memperhatikan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

BAPPEDA Kabupaten Gorontalo (2023) menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal,

seperti pengembangan kawasan agropolitan, penguatan sektor perikanan tangkap, serta promosi wisata berbasis budaya dan alam. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala koordinasi antar-dinas dan keterbatasan data perencanaan yang valid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara komprehensif dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terjadi di tingkat lokal.

Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini relevan karena isu perencanaan wilayah mencakup aspek multidimensi—melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—sehingga diperlukan pemahaman holistik terhadap proses dan konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini mengadopsi prinsip studi kasus (case study) sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018), yakni suatu strategi penelitian yang berfokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai studi kasus karena memiliki dinamika pembangunan yang khas serta potensi lokal yang belum sepenuhnya dioptimalkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang beragam. Lokasi penelitian meliputi kecamatan yang mewakili wilayah pertanian (misalnya Limboto dan Tibawa), wilayah pesisir (seperti Batudaa Pantai), serta kawasan perbukitan (misalnya Boliyohuto dan Mootilango). Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keberagaman potensi wilayah yang menjadi fokus pembangunan daerah. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari Juli hingga September 2025, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Gorontalo yang memiliki karakteristik geografis beragam—mulai dari dataran rendah yang subur di bagian tengah hingga kawasan perbukitan dan pesisir di bagian barat serta selatan. Luas wilayah Kabupaten Gorontalo mencapai sekitar 2.125 km² yang terbagi dalam 17 kecamatan, dengan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa (BPS Kabupaten Gorontalo, 2024).

Struktur ekonomi Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang lebih dari 35% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor jasa dan industri pengolahan mulai meningkat seiring

dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi lokal. Dari segi tata ruang, Kabupaten Gorontalo telah memiliki dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020–2040 yang menjadi pedoman pengembangan ruang wilayah. RTRW ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

Identifikasi Potensi Lokal di Kabupaten Gorontalo

Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian Kabupaten Gorontalo. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa, dan kakao tersebar di beberapa kecamatan, terutama Limboto, Tibawa, dan Pulubala. Pemerintah daerah juga mendorong penerapan pertanian berkelanjutan dengan memperkuat sistem irigasi dan pemberdayaan kelompok tani.

Namun, hasil wawancara dengan pejabat di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo (2025) menunjukkan bahwa tantangan utama masih terletak pada ketergantungan terhadap cuaca dan terbatasnya akses pasar modern. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan pembangunan perlu mengintegrasikan strategi diversifikasi pertanian dan penguatan rantai nilai produk lokal.

Wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo, terutama di Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu, memiliki potensi besar dalam subsektor perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi hasil laut seperti ikan cakalang, tuna, dan rumput laut berperan penting dalam menopang ekonomi masyarakat pesisir.

Pemerintah daerah telah merancang program pengembangan desa pesisir produktif dan memperkuat infrastruktur pelabuhan perikanan kecil. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan akses permodalan masih perlu ditingkatkan agar potensi kelautan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi wisata alam dan budaya, seperti Danau Limboto, Benteng Otanaha, dan kawasan wisata religi Bongo. Dalam RPJMD 2020–2026, pariwisata dijadikan sektor strategis yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Informan dari Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata diarahkan pada konsep ekowisata dan wisata budaya berbasis masyarakat, di mana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (United Nations, 2015).

Sektor UMKM di Kabupaten Gorontalo berkembang cukup pesat, terutama pada bidang pengolahan pangan, kerajinan tangan, dan industri rumah tangga. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan pelatihan, pendampingan usaha, serta digitalisasi pemasaran produk. Namun, berdasarkan hasil wawancara lapangan, hambatan utama masih berupa akses pembiayaan dan kapasitas manajerial yang terbatas. Dengan demikian, perencanaan wilayah yang efektif perlu mencakup strategi penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan pengembangan jejaring pasar digital.

Berdasarkan temuan lapangan dan telaah teoritis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Gorontalo telah mengarah ke pendekatan berbasis potensi lokal, namun masih menghadapi tantangan implementatif.

Secara konseptual, hasil penelitian ini mendukung teori Rostow (1960) tentang tahapan pembangunan, di mana keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kemampuannya mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mencapai *take-off stage*.

Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat konsep perencanaan partisipatif (*participatory planning*) sebagaimana dikemukakan Chambers (1997), bahwa keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat diberdayakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, langkah-langkah yang dapat memperkuat implementasi perencanaan berbasis potensi lokal antara lain:

1. Penguatan basis data potensi wilayah melalui pemetaan spasial digital;
2. Pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor di tingkat daerah;
3. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui musrenbang tematik dan forum desa inovatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan wilayah berbasis potensi lokal di Kabupaten Gorontalo telah menjadi arah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara sistematis.

1. Potensi Lokal sebagai Basis Pembangunan

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Potensi ini jika dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Namun, optimalisasi potensi tersebut masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan akses pasar yang belum merata antarwilayah.

2. Implementasi Perencanaan Wilayah Berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berbasis potensi lokal ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RTRW, serta mengembangkan program inovatif seperti *One Village One Product (OVOP)*. Akan tetapi, proses implementasinya masih terfragmentasi secara sektoral dan belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan lintas bidang serta keterlibatan multipihak.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan

Masyarakat telah mulai terlibat melalui forum **musrenbang**, namun tingkat partisipasinya masih berada pada level konsultatif, belum mencapai tahap *partnership*. Penguatan kapasitas masyarakat dan penyediaan ruang partisipasi substantif menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal.

4. Kendala dan Tantangan Pembangunan Wilayah

Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM perencana, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Selain itu, kesenjangan antarwilayah (antara pusat kabupaten dan daerah pinggiran) masih cukup mencolok, sehingga diperlukan strategi pemerataan pembangunan yang lebih inklusif.

5. Relevansi terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal di Kabupaten Gorontalo secara prinsip telah mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek ekonomi dan sosial. Namun, aspek lingkungan masih memerlukan perhatian lebih, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi terhadap degradasi lingkungan.

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk perbaikan dan penguatan perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Basis Data Potensi Wilayah

Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi geospasial yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Data ini harus mencakup potensi sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara menyeluruh sehingga perencanaan dapat bersifat *evidence-based*.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aparatur perencana di tingkat kabupaten hingga desa perlu diberikan pelatihan teknis mengenai analisis spasial, perencanaan partisipatif, dan manajemen pembangunan berkelanjutan. Dukungan akademisi dan lembaga penelitian lokal dapat menjadi mitra strategis dalam peningkatan kapasitas ini.

3. Mendorong Partisipasi Substantif Masyarakat

Forum musrenbang perlu direformulasi agar tidak sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi ruang dialog aktif antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pembentukan forum masyarakat desa inovatif dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ide pembangunan berbasis potensi lokal.

4. Membangun Kolaborasi Multipihak (*Collaborative Governance*)

Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat (quadruple helix). Kolaborasi ini dapat mendukung inovasi kebijakan, memperluas akses pembiayaan pembangunan, dan mempercepat transfer pengetahuan lokal menuju praktik berkelanjutan.

5. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah

Diperlukan kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal di wilayah perbukitan dan pesisir, melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik,

serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal agar ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi.

6. Integrasi Prinsip Keberlanjutan dalam Setiap Program Pembangunan

Setiap program pembangunan perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2019). *Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariani, N., & Kurniawan, A. (2020). Strategi Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 155–168. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>
- Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, E., & Kurnia, D. (2022). Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Perdesaan. *Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.21009/japd.101.45>
- Dewi, S. P., & Sari, R. A. (2018). Perencanaan Wilayah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 15(3), 221–234. <https://doi.org/10.14710/jwk.15.3.221-234>
- Fauzi, A., & Anna, Z. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Bogor: IPB Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan Daerah 2020–2024*. Jakarta: Kemendagri.
- Kuncoro, M. (2021). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2023–2028*. Limboto: Bappeda Kabupaten Gorontalo.
- Rahmawati, L., & Prawira, H. (2022). Optimalisasi Potensi Lokal dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan*

- Pembangunan Indonesia*, 12(4), 341–357.
<https://doi.org/10.22146/jepi.12345>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: IPB Press.
- Setiawan, D., & Firmansyah, I. (2019). Implementasi Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Indonesia Timur. *Jurnal Perencanaan dan Kebijakan Publik*, 9(1), 60–75. <https://doi.org/10.1080/abcd123>
- Suryana, D. (2020). Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 173–187. <https://doi.org/10.15578/jsekp.15.2.173>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson Education.
- Utami, H., & Rachma, A. (2021). Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 11(2), 98–112. <https://doi.org/10.31000/jipap.v11i2.1120>
- Widodo, T. (2022). Analisis Pengaruh Infrastruktur dan Potensi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(3), 245–260. <https://doi.org/10.24815/ekp.v11i3.25470>
- Yuliani, S., & Pertiwi, D. (2021). Perencanaan Wilayah Berkelanjutan dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Indonesia*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xyz12>